

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang tidak hanya mencakup pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga transformasi struktural dalam sistem sosial, kelembagaan, dan ekonomi suatu negara. Menurut Todaro & Smith (2020), pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, serta perluasan akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitatif seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga aspek kualitatif yang mencerminkan kualitas hidup manusia. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan sejatinya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan suatu negara tidak cukup dinilai dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Sen, 1999).

Hubungan antara pembangunan dan kesejahteraan bersifat erat dan saling memengaruhi. Pembangunan yang efektif akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses

terhadap kebutuhan dasar. Sebaliknya, tanpa kesejahteraan yang merata, pembangunan ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan instabilitas politik. Oleh karena itu, pembangunan berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam kerangka pembangunan manusia, pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kemampuan manusia untuk hidup produktif, sehat, dan berdaya. Konsep ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pembangunan melalui tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pendidikan yang layak, serta standar hidup yang layak (UNDP, 2010). Pembangunan manusia menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena kualitas hidup masyarakat sangat menentukan efektivitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi indikator kegagalan pembangunan manusia, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam pencapaian tujuan kebijakan ekonomi secara menyeluruh.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah mendasar yang tidak hanya mencerminkan rendahnya capaian pembangunan manusia, tetapi juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Secara umum, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal secara layak.

Sementara pengangguran menggambarkan situasi ketika seseorang yang tergolong angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan (Bappenas, 2020). Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (BPS, 2024). Sedangkan untuk pengangguran, BPS menggunakan definisi pengangguran terbuka sebagai bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (BPS, 2024). Dalam konteks akademik, Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial yang memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Krisis ekonomi Asia yang melanda pada pertengahan 1997 menjadi titik balik penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Krisis ini bermula dari gejolak nilai tukar di kawasan Asia Tenggara, yang kemudian memicu jatuhnya rupiah secara drastis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot dari sekitar Rp 2.500 per USD pada pertengahan 1997 menjadi lebih dari Rp 15.000/USD pada Januari 1998 (BPS, 2000). Depresiasi tajam ini memicu inflasi tinggi yang mencapai 77,6% pada tahun 1998 (BPS, 2000),

sehingga daya beli masyarakat anjlok dan perekonomian nasional mengalami kontraksi hingga -13,1% pada tahun yang sama.

Dampak sosial-ekonomi krisis ini sangat luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional melonjak dari 17,47% pada 1996 menjadi 24,23% pada 1998, yang berarti lebih dari 49 juta penduduk jatuh dalam kemiskinan (BPS, Susenas 1996–1998). Pada saat yang sama, angka pengangguran terbuka meningkat pesat, didorong oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri dan formal. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka naik dari 4,68% pada 1997 menjadi 5,46% pada 1999 (BPS, Sakernas 1997–1999).

Krisis ini juga mengubah lanskap politik dan kelembagaan Indonesia. Tekanan ekonomi yang berat disertai ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru memicu demonstrasi besar-besaran, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998. Periode ini menandai dimulainya era Reformasi, di mana transisi politik berlangsung menuju sistem demokrasi multipartai, desentralisasi pemerintahan, serta reformasi kebijakan ekonomi. Meski demikian, situasi ekonomi pada awal era Reformasi masih rapuh. Investasi asing langsung (FDI) turun tajam, perbankan menghadapi restrukturisasi besar-besaran, dan tingkat kemiskinan serta pengangguran tetap tinggi hingga awal 2000-an (Hill, 2000; Aswicahyono et al., 2010).

Memasuki periode 1999–2004, pemerintah berupaya memulihkan stabilitas makroekonomi melalui program penyesuaian struktural,

pengendalian inflasi, serta restrukturisasi perbankan dan utang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi mulai berangsur pulih dengan rata-rata 4,6% per tahun pada periode 2000–2004 (BPS, 2005). Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada, termasuk tingginya tingkat kemiskinan (16,66% pada 2004) dan pengangguran terbuka (9,86% pada 2004) (BPS, Susenas dan Sakernas 2004).

Memasuki tahun 2004, Indonesia menghadapi tantangan ganda: pemulihan ekonomi pasca-krisis 1997–1998 dan transformasi politik pascareformasi. Setelah hampir satu dekade dalam fase transisi, tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya. Selain itu, pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, serta legislatif daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Momentum politik ini mencerminkan konsolidasi demokrasi yang makin matang. Liddle dan Mujani (2005) menyebut peristiwa ini sebagai simbol keberhasilan transisi politik pascareformasi, yang memperkuat sistem presidensial demokratis dan mendorong akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

Dalam pemilu tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004–2009, membawa agenda pembangunan nasional yang dirumuskan dalam tiga pilar utama: *pro-growth* (mendorong pertumbuhan ekonomi), *pro-poor* (mengurangi kemiskinan), dan *pro-job* (menciptakan lapangan kerja) (Bappenas, 2005). Ketiga pilar ini menjadi kerangka arah kebijakan

pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan makroekonomi, tetapi juga memperhatikan distribusi hasil pembangunan secara adil dan inklusif. Sejak awal masa kepemimpinannya, SBY menunjukkan komitmen untuk menjadikan isu kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas strategis, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan RPJMN 2010–2014.

Tabel 1.1 Krisis Ekonomi yang Mempengaruhi Indonesia pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009)

Tahun	Tantangan Ekonomi Utama	Dampak Terkait	Respons Pemerintah
2005–2006	Kenaikan harga minyak dunia & depresiasi rupiah	Inflasi tinggi, melemahnya daya beli masyarakat miskin	Kenaikan harga BBM disertai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005–2006
2008 (Global)	Krisis keuangan global	Penurunan ekspor, tekanan likuiditas sektor perbankan	Paket stimulus fiskal, pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, serta penyediaan fasilitas dana darurat

Dibuat oleh: Penulis (2025)

Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009), Indonesia menghadapi dua krisis utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Krisis pertama terjadi pada tahun 2005–2006 yang dipicu oleh kenaikan tajam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) global hingga mencapai di atas USD 70 per barel. Indonesia yang saat itu masih mengimpor BBM dalam jumlah besar terkena dampaknya serta depresiasi nilai tukar rupiah. Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri (kenaikan BBM), yang menyebabkan lonjakan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Namun, pemerintah juga merespons dengan kebijakan

kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penguatan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin tetap stabil.

Krisis kedua yang dialami Indonesia terjadi pada tahun 2008, sebagai imbas dari krisis keuangan global. Dampaknya terlihat dari menurunnya kinerja ekspor nasional dan terganggunya likuiditas dalam sistem keuangan domestik. Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif melalui kebijakan stimulus fiskal, pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia, dan penyediaan fasilitas dana darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah agar krisis tidak meluas ke sektor riil. Kedua krisis ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan responsif dan program perlindungan sosial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan global maupun domestik.

Situasi ini menegaskan pentingnya peran kebijakan responsif dan program perlindungan sosial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan global maupun domestik. Meskipun sempat melambat akibat krisis tersebut, perekonomian Indonesia tergolong cepat pulih berkat fondasi ekonomi makro yang relatif kuat. Pemerintah berupaya menjaga momentum pemulihan dengan meningkatkan belanja infrastruktur, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja dan menekan potensi lonjakan angka pengangguran secara signifikan.

SBY kembali memenangkan pemilu presiden pada 2009 dengan

dukungan elektoral yang signifikan, kali ini didampingi oleh Prof. Dr. Boediono, seorang ekonom senior yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kehadiran Boediono dalam kabinet memperkuat arah pemerintahan ke dalam model teknokratis dan profesional dalam pengelolaan ekonomi. Dengan legitimasi politik yang kuat selama dua periode berturut-turut, pemerintahan SBY memiliki stabilitas yang cukup untuk menjalankan berbagai reformasi ekonomi, memperluas program perlindungan sosial, dan meningkatkan efektivitas belanja publik untuk mengatasi masalah struktural seperti kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 1.2 Tantangan Makroekonomi pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II (2010–2014)

Tahun	Tekanan Ekonomi Utama	Dampak Terkait	Respons Pemerintah / BI
2011	Krisis utang di Eropa dan perlambatan ekonomi global	Fluktuasi arus modal, tekanan terhadap keuangan nasional	Koordinasi kebijakan makroprudensial, stabilisasi fiskal
2013	<i>Taper tantrum</i> AS (pengumuman pengurangan stimulus moneter)	Depresiasi rupiah, tekanan inflasi, arus keluar modal	BI menaikkan suku bunga, memperketat likuiditas pasar
2012–2014	Penurunan harga komoditas ekspor seperti batu bara dan sawit	Pertumbuhan PDB melambat (di bawah 5% pada 2013–2014)	Percepatan investasi infrastruktur dan kebijakan ekspor

Dibuat Oleh: Penulis (2025)

Walaupun periode 2010–2014 tidak menunjukkan krisis ekonomi klasikal seperti kontraksi PDB negatif atau kegagalan sistem keuangan, terdapat beberapa tekanan makroekonomi signifikan yang memengaruhi dinamika penurunan kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2011, krisis utang di kawasan Eropa dan perlambatan ekonomi global menyebabkan terjadinya arus modal keluar dan volatilitas pasar keuangan domestik. Bank Indonesia bersama pemerintah merespon dengan memperkuat kebijakan

makroprudensial dan menjaga koordinasi fiskal–moneter untuk memitigasi risiko atas stabilitas ekonomi nasional. Memasuki tahun 2013, fenomena taper tantrum yang dipicu oleh rencana *Federal Reserve* AS menghentikan stimulus moneter memicu tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi domestik. Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan memperkuat cadangan likuiditas guna menahan pelemahan rupiah dan menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, penurunan harga komoditas global seperti batu bara dan minyak sawit pada periode 2012–2014 berdampak pada penerimaan devisa dari ekspor. Meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama perekonomian Indonesia—dengan kontribusi lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi—perlambatan ini memperlambat laju pertumbuhan PDB menjadi di bawah 5%, mengurangi ruang fiskal untuk program sosial dan investasi publik.

Dalam konteks penurunan kemiskinan dan pengangguran selama 2004–2014, tekanan eksternal tersebut menjadi tantangan penting. Pemerintah menanggapi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peluncuran program sosial seperti Kartu Sehat dan KS/Kartu Pintar, dan peningkatan insentif fiskal untuk investasi daerah. Strategi ini dirancang untuk mempertahankan momentum penurunan kemiskinan sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung selama dua periode, yaitu tahun 2004–2009 dan 2009–2014, isu pengentasan kemiskinan dan pengangguran menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam visi

pembangunan nasional yang dikenal dengan prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan 2010–2014 (Bappenas, 2014). Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang dirancang untuk merespons tantangan struktural maupun situasional, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Kedua program ini dipilih sebagai fokus utama karena cakupannya yang luas, dampaknya yang terukur, serta kontribusinya yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Program BLT diluncurkan pertama kali pada tahun 2005 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2008 sebagai respons atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat miskin. BLT diberikan dalam bentuk tunai kepada rumah tangga miskin yang telah terdaftar berdasarkan data BPS. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa BLT berhasil mengurangi kerentanan ekonomi jangka pendek masyarakat miskin serta menjaga konsumsi dasar rumah tangga sasaran. Studi yang dilakukan oleh Widjaja (2009) menunjukkan bahwa BLT memberikan kontribusi sebesar sekitar 15 persen terhadap pengeluaran rumah tangga penerima manfaat, sehingga mampu menahan dampak inflasi terhadap kelompok rentan.

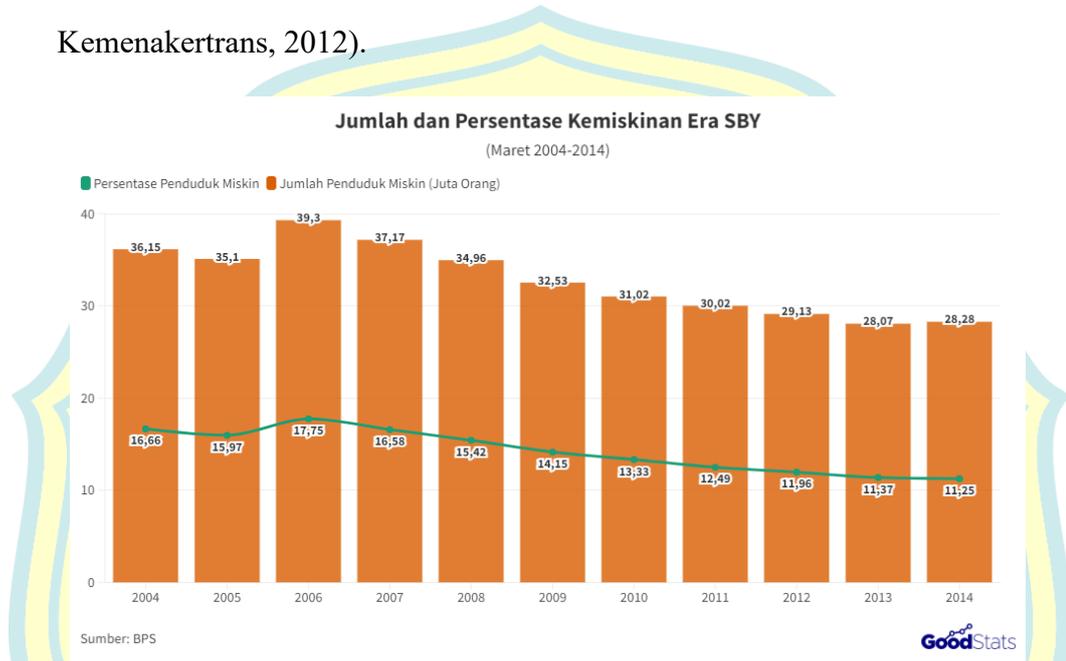
Program kedua, yaitu PKH, mulai diimplementasikan sejak tahun

2007 sebagai program bantuan sosial bersyarat pertama di Indonesia. Tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan insentif kepada rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil, dengan syarat partisipasi aktif dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama lembaga internasional seperti *World Bank* dan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) menunjukkan bahwa PKH meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan cakupan imunisasi, dan menurunkan prevalensi stunting dalam rumah tangga penerima manfaat (World Bank, 2012; J-PAL, 2013).

Di sisi lain, penanggulangan pengangguran ditempuh melalui strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di sektor informal. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dikembangkan untuk mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga miskin.

Upaya lain yang ditempuh adalah penguatan pelatihan vokasional melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian (mismatch) antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor industri dan jasa. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai proyek infrastruktur padat karya yang tidak hanya

ditujukan untuk memperbaiki konektivitas wilayah, tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Pendekatan ini dinilai efektif karena menciptakan efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar (Bappenas, 2010; Kemenakertrans, 2012).



Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Tahun 2004-2014

Secara empiris, efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) tercermin dalam data makro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 16,66 persen (36,15 juta orang) pada tahun 2004 menjadi 11,25 persen (28,28 juta orang) pada tahun 2014. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari implementasi berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dalam dua periode kepemimpinan tersebut.

Sejumlah program utama seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini berperan penting dalam mendorong penurunan angka kemiskinan. BLT berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi rumah tangga miskin terdampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, sedangkan PKH meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan (Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Sementara itu, penurunan angka pengangguran juga menunjukkan capaian positif. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 5,94 persen pada tahun 2014 (BPS, 2015). Jumlah pengangguran yang sempat mencapai 11,9 juta orang pada tahun 2005 juga menurun menjadi sekitar 7,2 juta orang pada akhir 2014. Penurunan ini mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, meskipun sebagian besar masih berasal dari sektor informal.

Faktor yang berkontribusi terhadap penurunan pengangguran di antaranya adalah pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya. Pemerintah memperkuat UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan keterampilan usaha, serta dukungan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE). UMKM dikenal sebagai sektor yang cepat menyerap tenaga kerja, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah. Selain itu, pelatihan vokasional juga ditingkatkan guna mengatasi kesenjangan keterampilan (skills mismatch) antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur nasional turut membuka lapangan kerja baru, terutama dalam skema proyek padat karya yang menysasar tenaga kerja lokal dengan biaya

rendah (Bappenas, 2010).

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama menyangkut kualitas pekerjaan yang diciptakan. Banyak dari pekerjaan di sektor informal bersifat tidak tetap, tanpa perlindungan sosial, dan dengan produktivitas rendah. Oleh karena itu, meskipun angka pengangguran menurun, tidak seluruhnya mencerminkan perbaikan kualitas pekerjaan secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan cakupan, durasi pelaksanaan, serta bukti dampak sosial-ekonominya, maka program BLT dan PKH dipilih sebagai fokus utama dalam kajian pengentasan kemiskinan. Sementara itu, dalam isu pengangguran, perhatian diberikan pada pengembangan UMKM dan KUBE, peningkatan pelatihan vokasional, serta pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya sebagai tiga pilar utama strategi penanggulangan.

Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan empirik, yakni sejauh mana program-program tersebut terbukti efektif dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ketenagakerjaan. Keberhasilan program ini tercermin melalui indikator makro yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran selama dua periode pemerintahan, serta cakupan yang luas dari segi jumlah penerima manfaat dan keberlanjutan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan landasan pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan ekonomi pada periode 2004–2014 memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Penelitian akan menggunakan pendekatan berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik

(BPS) serta dokumentasi kebijakan pemerintah seperti RPJMN dan evaluasi program dari lembaga terkait, agar memastikan akurasi dan relevansi terhadap kondisi nasional.

Kajian ilmiah yang secara spesifik mengulas dampak kebijakan ekonomi terhadap dua indikator utama — kemiskinan dan pengangguran — pada periode ini masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada politik ekonomi makro, pertumbuhan GDP, atau reformasi struktural, tanpa secara eksplisit mengevaluasi dampak sosial yang nyata dari kebijakan pemerintah. Misalnya, skripsi karya Bintoro (2020) dari UIN Sunan Kalijaga meneliti bentuk-bentuk kebijakan politik ekonomi SBY, namun tidak mendalami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi angka kemiskinan atau pengangguran secara sistematis. Demikian pula, studi Sihalo (2018) di Universitas Sumatera Utara membahas implikasi fiskal dari kenaikan harga BBM, tetapi belum menguji efek sosial-ekonomi secara rinci terhadap kelompok masyarakat miskin atau pencari kerja.

Jumlah penelitian kuantitatif yang mengaitkan secara langsung kebijakan seperti BLT dan PKH, dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga masih terbatas — padahal evaluasi dari lembaga seperti Bappenas dan World Bank menunjukkan adanya kontribusi nyata dari program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, data BPS mencatat penurunan kemiskinan dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 11,25 persen pada 2014, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 9,86 persen menjadi 5,94 persen pada periode yang sama (BPS, 2015). Penurunan ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi makro,

tetapi juga sejalan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam mengisi kekosongan kajian akademik terkait evaluasi empiris terhadap dampak kebijakan ekonomi nasional pada periode 2004–2014. Fokus pada indikator kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran memungkinkan analisis yang lebih konkret dan terukur terhadap efektivitas berbagai program yang dijalankan pemerintah saat itu. Harapannya, studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi-politik Indonesia kontemporer serta menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan tidak melebar, maka ditetapkan dua batasan utama, yaitu batasan temporal dan batasan spasial.

a. Batasan Temporal

Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2004 hingga 2014, yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Batasan waktu ini dipilih untuk mengevaluasi konsistensi serta kesinambungan kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam rentang waktu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

b. Batasan spasial

Secara spasial, penelitian ini berfokus pada wilayah Indonesia secara nasional. Analisis dilakukan berdasarkan data makro yang dirilis oleh instansi resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga tidak menyoroti kondisi daerah atau wilayah tertentu secara spesifik, tetapi lebih pada kecenderungan nasional secara agregat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk program-program kebijakan ekonomi yang dijalankan pada tahun 2004–2014 dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran ?
- b. Bagaimana dampak program-program kebijakan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2004–2014 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk program-program kebijakan ekonomi yang dijalankan pada rentang tahun 2004–2014 dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Untuk menganalisis dampak dari program-program kebijakan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran pada rentang tahun 2004–2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks kajian ekonomi makro dan kebijakan publik di Indonesia, serta menjadi referensi ilmiah di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

b. Kegunaan Praktik

Secara praktis, memberikan gambaran empiris yang dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, serta pihak terkait dalam merancang program-program kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di masa mendatang..

D. Kerangka Teori / Kerangka Analisis

Dalam penelitian ini, pendekatan teori digunakan sebagai alat bantu analisis untuk memahami hubungan antara kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kerangka ini membantu peneliti menafsirkan fakta sejarah secara ilmiah dan sistematis.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespons permasalahan yang berkembang di masyarakat. Menurut Dye (2002), kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do”, artinya mencakup keputusan

pemerintah untuk bertindak ataupun tidak bertindak terhadap isu-isu publik.

Untuk memahami dinamika kebijakan publik, Dye memperkenalkan *model input-output*, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai **masukan** (input), seperti tuntutan masyarakat, kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Masukan ini kemudian diolah melalui proses pengambilan keputusan politik, yang menghasilkan **kebijakan publik** sebagai bentuk respons pemerintah. Hasil akhir dari kebijakan tersebut disebut sebagai **output** atau dampak kebijakan, yang dapat dilihat dari perubahan kondisi masyarakat.

Skema model input-output Dye dapat digambarkan sebagai berikut:

Masukan (Input) → Proses Politik dan Perumusan Kebijakan → Kebijakan Publik (Output) → Dampak terhadap Masyarakat

Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi terbentuk dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2004–2014, khususnya dalam menghadapi isu kemiskinan dan pengangguran. Proses tersebut mencakup bagaimana permasalahan sosial dan ekonomi direspons melalui kebijakan, serta bagaimana implementasi program-program ekonomi menghasilkan dampak nyata terhadap masyarakat.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam analisis kebijakan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka panjang,

sementara pembangunan ekonomi mencakup perubahan struktural yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam pendekatannya, Todaro dan Smith menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang inklusif mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan institusional, seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Kebijakan makro seperti fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dan keadilan sosial justru dapat memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan inklusif menuntut agar kebijakan ekonomi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin.

Dalam konteks penelitian ini, teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan selama periode pemerintahan 2004–2014 mampu menciptakan pertumbuhan, serta sejauh mana pertumbuhan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kultural. Dalam literatur ilmu sosial dan ekonomi, kemiskinan diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan, antara lain kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi ketika pendapatan individu berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara minimum, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan pakaian (Todaro & Smith, 2011). Sementara itu, kemiskinan relatif merujuk pada ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat, di mana seseorang dianggap miskin jika berada jauh di bawah standar hidup rata-rata di lingkungannya.

Selain itu, terdapat pendekatan kemiskinan struktural, yang memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan sistemik dan hambatan struktural, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik yang berkualitas. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang timpang.

United Nations Development Programme (UNDP) juga memperkenalkan indikator Human Poverty Index (HPI), yang mengukur kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari aspek ketidakterjangkauan terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Dalam konteks penelitian ini, teori kemiskinan digunakan untuk

menjelaskan bagaimana kebijakan dan program ekonomi yang dijalankan pemerintah pada periode 2004–2014 diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan, melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Analisis ini penting untuk melihat apakah kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan kemiskinan dari sisi penyebab dan indikator yang relevan.

4. Teori Pengangguran

Teori pengangguran menjadi fondasi penting dalam menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengatasi permasalahan kurangnya lapangan kerja di suatu negara. Dalam konteks ini, dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami pengangguran adalah teori Klasik dan Keynesian.

Menurut teori Klasik, pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, khususnya ketika tingkat upah ditetapkan terlalu tinggi di atas tingkat keseimbangan. Dalam pandangan ini, pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, dan setiap ketidakseimbangan akan menyesuaikan secara otomatis melalui mekanisme upah. Artinya, jika terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja (pengangguran), maka upah akan turun dan pasar kembali seimbang. Namun, teori ini kurang mampu menjelaskan fenomena pengangguran jangka panjang yang tetap tinggi meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam tingkat upah.

Sebaliknya, teori Keynesian yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes menekankan bahwa pengangguran dapat bertahan dalam jangka panjang karena ketidakseimbangan permintaan agregat. Dalam

kondisi resesi atau krisis, sektor swasta mungkin tidak cukup memberikan permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal—misalnya dengan meningkatkan belanja negara untuk proyek-proyek padat karya—guna menciptakan lapangan kerja baru. Pandangan Keynesian inilah yang menjadi dasar bagi banyak kebijakan penciptaan lapangan kerja selama periode krisis atau stagnasi ekonomi.

Selain itu, pengangguran juga dapat dijelaskan melalui konsep pengangguran struktural dan friksional. Pengangguran struktural muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, misalnya akibat kemajuan teknologi atau perubahan struktur industri. Sementara itu, pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang bersifat sementara dan terjadi karena adanya proses transisi tenaga kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.

Dalam konteks kebijakan ekonomi pada periode 2004–2014, pemahaman terhadap berbagai jenis pengangguran ini menjadi dasar dalam merancang berbagai program pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi kelompok usia produktif. Dengan demikian, kerangka teori ini mendasari logika di balik program-program ekonomi yang dirancang untuk menurunkan angka pengangguran secara berkelanjutan dan inklusif.

E. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu metode yang lazim

digunakan dalam kajian ilmu sejarah untuk menelusuri, merekonstruksi, dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan faktual. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengungkap dan menganalisis kebijakan ekonomi nasional dalam kurun waktu 2004–2014 serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Melalui pendekatan historis, penulis dapat menelusuri perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu, menggali konteks sosial-ekonomi saat itu, serta memahami dampak kebijakan secara faktual dan kronologis. Penelitian ini disajikan secara deskriptif-naratif, dengan menggabungkan data, interpretasi, dan pemahaman terhadap konteks sosial-ekonomi Indonesia selama periode tersebut.

Secara umum, langkah-langkah dalam metode historis ini mencakup lima tahapan utama (Kuntowijoyo, 1995):

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dalam sebuah penelitian merupakan langkah awal yang menentukan arah dan fokus kajian. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk membahas kebijakan ekonomi nasional dalam kurun waktu 2004–2014 serta dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran. Topik ini dianggap relevan karena menyangkut isu sosial-ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia hingga saat ini.

Pemilihan topik ini juga didasari oleh kepedulian penulis terhadap persoalan sosial-ekonomi yang berdampak langsung terhadap

kualitas hidup masyarakat. Dari sisi akademik, topik ini berkaitan erat dengan studi sejarah ekonomi, kebijakan publik, dan pembangunan. Selain itu, ketersediaan data dan literatur yang memadai turut mendukung pemilihan topik ini, mulai dari dokumen pemerintah, statistik BPS, hingga jurnal dan kajian ilmiah lainnya.

b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap ini mencakup proses pengumpulan data dan informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan mengandalkan dua jenis sumber: primer dan sekunder.

- 1) Sumber Primer, meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, laporan APBN tahun 2005–2014, data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), laporan statistik kemiskinan dan pengangguran, serta pidato resmi kenegaraan yang mencerminkan arah kebijakan pemerintah saat itu.
- 2) Sumber Sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel daring dari sumber yang kredibel. Literatur seperti Todaro & Smith (2020), Yustika (2009), serta jurnal-jurnal tentang kebijakan ekonomi dan sosial digunakan sebagai landasan teoritis dan pisau analisis.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua:

- 1) Kritik Ekstern, menilai otentisitas sumber berdasarkan asal

penerbitan, penulis, dan konteks waktu. Misalnya, dokumen dari BPS, Kemenkeu, dan Kementerian terkait yang diterbitkan secara resmi dinilai memiliki validitas tinggi.

2) Kritik Intern, menelaah isi sumber secara kritis untuk memastikan relevansi, konsistensi, dan logika internalnya. Penulis membandingkan data dari pemerintah dengan laporan media dan evaluasi independen guna menjaga objektivitas.

d. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi merupakan tahapan analisis terhadap data dan fakta sejarah. Penulis menafsirkan hubungan sebab-akibat, konteks sosial-politik, serta implikasi dari kebijakan yang dijalankan. Misalnya, program seperti BLT dan PKH tidak hanya dianalisis dari sisi output, tetapi juga dari segi konteks pelaksanaan dan penerimaan masyarakat.

Interpretasi dilakukan secara analitis dan kritis, dengan menggabungkan sudut pandang dari berbagai sumber. Pendekatan ini memungkinkan penulis membentuk narasi yang koheren dan menyeluruh mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

e. Historiografi (Penulisan)

Tahap terakhir adalah menyusun narasi sejarah berdasarkan temuan dan analisis. Penulisan dilakukan secara sistematis, kronologis, dan deskriptif-naratif untuk menggambarkan dinamika kebijakan ekonomi dan dampaknya selama 2004–2014. Penulis menyajikan argumen secara objektif dan berdasarkan data yang valid, sehingga dapat

memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami sejarah kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer.



Intelligentia - Dignitas